



LAPORAN HASIL PENELITIAN

KONFLIK LAGI, PPP BAKAL TANGGUH ATAU RUNTUH?

Ahmad Khoirul Umam

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS FALSAFAH DAN PERADABAN
UNIVERSITAS PARAMADINA
JAKARTA**

2022



SURAT PERNYATAAN DAN VALIDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ahmad Khoirul Umam
2. NIP : 0326028404
3. Fakultas : Falsafah dan Peradaban
4. Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang saya ajukan dengan judul:

KONFLIK LAGI, PPP BAKAL TANGGUH ATAU RUNTUH?

merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi-sanksi yang dijatuhkan karena kesalahan tersebut, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 13 September 2022
Yang membuat pernyataan

Ahmad Khoirul Umam
NIP: 0326028404



LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN

Judul Penelitian:

KONFLIK LAGI, PPP BAKAL TANGGUH ATAU RUNTUH?

Telah disahkan dan disetujui oleh Dewan Pembina Penelitian (DPP) Universitas Paramadina, pada:

Hari/Tanggal : Selasa/13 September 2022

Dana Penelitian : Rp. 1.500.000,00

Yang mensahkan dan menyetujui:

1. Dewan Peneliti I :
2. Dewan Peneliti II
3. Direktur LPPM

Peneliti:

1. Ahmad Khoirul Umam (.)

DAFTAR ISI

COVER.....	2
SURAT PERNYATAAN DAN VALIDASI.....	2
LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB 1: PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metodologi Penelitian	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Teori Konflik dalam Partai Politik.....	9
2.2 Sejarah Konflik Internal PPP.....	9
2.3 Dampak Konflik Internal terhadap Elektabilitas Partai	9
2.4 Manajemen Konflik dalam Partai Politik.....	10
2.5 Studi Empiris tentang Konflik Internal Partai di Indonesia	10
BAB 3: METODE PENELITIAN	11
3.1 Pendekatan Penelitian	11
3.2 Desain Penelitian.....	11
3.3 Sumber Data.....	11
3.4 Teknik Pengumpulan Data	12
3.5 Teknik Analisis Data.....	12
3.6 Validitas dan Reliabilitas.....	12
BAB 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	14
4.1 Hasil Penelitian.....	14
4.2 Pembahasan.....	15

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN.....	17
5.1 Kesimpulan.....	17
5.2 Saran	18
DAFTAR PUSTAKA.....	20

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebuah partai politik dengan simbol Kabah yang telah beroperasi sejak era Orde Baru, kini kembali menghadapi tantangan besar. Konflik internal yang berkepanjangan telah menjadi ciri khas partai ini dan terus mempengaruhi stabilitas serta elektabilitasnya. Persoalan ini menjadi sorotan utama menjelang Pemilu 2024, di mana PPP perlu memperbaiki citra dan kinerjanya untuk tetap relevan dalam kancah politik nasional.

Konflik terbaru yang melibatkan pelengseran Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum menambah panjang daftar permasalahan internal PPP. Suharso, yang sebelumnya terjerat dugaan gratifikasi dan membuat pernyataan kontroversial mengenai "amplop kiai," telah menjadi pusat perhatian dan kritik dari berbagai kalangan, termasuk kader partai sendiri. Unjuk rasa yang terjadi di kantor DPP PPP mencerminkan ketidakpuasan dan ketidakstabilan internal yang signifikan.

Sejarah konflik di PPP tidak hanya terbatas pada masa kini. Pada Pemilu 1988, misalnya, partai ini mengalami penurunan suara yang drastis akibat perselisihan internal. Situasi serupa juga terjadi pada era Reformasi, ketika terjadi perebutan posisi ketua umum antara Suryadharma Ali dan Romahurmuziy. Semua ini menunjukkan bahwa konflik internal telah menjadi isu berulang yang menghambat kemajuan partai.

Konflik-konflik ini diperkirakan akan berdampak negatif pada perolehan suara PPP di Pemilu 2024. Menurut analisis politik, ketidakstabilan internal dan kegagalan manajerial kepemimpinan partai merupakan faktor utama yang menghambat peningkatan elektabilitas PPP. Lebih lanjut, konflik internal juga diperkirakan akan mengganggu soliditas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang dibentuk PPP bersama Golkar dan PAN.

Melalui penelitian ini, penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam latar belakang, dampak, dan prospek masa depan PPP dalam menghadapi Pemilu 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai dinamika internal partai dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kinerja serta strategi politik mereka ke depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab konflik internal dalam PPP?
2. Bagaimana dampak konflik internal terhadap elektabilitas PPP menjelang Pemilu 2024?
3. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh PPP untuk mengatasi konflik internal dan meningkatkan elektabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik internal dalam PPP.
2. Menganalisis dampak konflik internal terhadap elektabilitas PPP menjelang Pemilu 2024.
3. Merumuskan strategi yang dapat diterapkan oleh PPP untuk mengatasi konflik internal dan meningkatkan elektabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai dinamika internal partai politik di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi PPP dalam merumuskan strategi untuk mengatasi konflik internal dan meningkatkan elektabilitas partai.
3. Secara kebijakan, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam memahami dan mengelola konflik internal partai politik demi terciptanya stabilitas politik yang lebih baik.

1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan, analisis dokumen, serta studi literatur yang berkaitan dengan konflik internal dan dinamika politik PPP.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Konflik dalam Partai Politik

Konflik dalam partai politik adalah fenomena yang umum terjadi dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan ideologi, kepentingan pribadi, dan persaingan kekuasaan. Teori konflik dalam partai politik menjelaskan bahwa konflik ini seringkali muncul dari ketidakpuasan anggota terhadap kebijakan atau keputusan pemimpin partai. Menurut Ralf Dahrendorf, konflik sosial adalah bagian integral dari kehidupan sosial yang dapat memicu perubahan struktural dalam suatu organisasi .

Lewis Coser juga menambahkan bahwa konflik tidak selalu berdampak negatif; konflik dapat menjadi sarana untuk memperjelas norma dan meningkatkan kohesi kelompok jika dikelola dengan baik . Namun, konflik yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan fragmentasi dan melemahkan struktur organisasi, seperti yang terlihat dalam sejarah konflik internal PPP.

2.2 Sejarah Konflik Internal PPP

PPP memiliki sejarah panjang konflik internal yang mempengaruhi stabilitas dan elektabilitas partai. Salah satu contoh paling signifikan adalah pada tahun 1988 ketika perselisihan antara faksi yang didukung oleh John Naro dan faksi dari Nahdlatul Ulama menyebabkan penurunan suara PPP secara drastis . Konflik serupa terjadi kembali pada era Reformasi dengan adanya perebutan posisi ketua umum antara Suryadharma Ali dan Romahurmuziy, serta konflik yang melibatkan Djan Faridz.

Konflik ini seringkali dipicu oleh perbedaan kepentingan antara faksi-faksi dalam partai, persaingan kekuasaan, dan isu-isu moral serta hukum yang melibatkan pemimpin partai. Ketidakmampuan partai untuk mengelola konflik-konflik ini berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik dan perolehan suara dalam pemilu.

2.3 Dampak Konflik Internal terhadap Elektabilitas Partai

Penelitian menunjukkan bahwa konflik internal dalam partai politik dapat berdampak signifikan terhadap elektabilitas partai tersebut. Konflik yang berkepanjangan cenderung mengurangi kepercayaan publik dan simpati pemilih, yang pada akhirnya menurunkan

perolehan suara dalam pemilu. Menurut Ari Junaedi, konflik internal di PPP mengganggu soliditas partai dan menghambat kerja-kerja politik yang bertujuan meningkatkan elektabilitas .

Studi kasus pada partai-partai politik lain juga menunjukkan pola serupa. Misalnya, konflik internal dalam Partai Golkar pada era Reformasi berdampak negatif pada elektabilitas partai hingga akhirnya mampu bangkit kembali setelah restrukturisasi kepemimpinan dan konsolidasi internal yang efektif.

2.4 Manajemen Konflik dalam Partai Politik

Manajemen konflik adalah proses yang penting untuk menjaga stabilitas dan kohesi dalam partai politik. Beberapa strategi yang dapat digunakan termasuk mediasi, negosiasi, dan pembentukan komite resolusi konflik yang independen. Teori manajemen konflik oleh Kenneth Thomas dan Ralph Kilmann mengidentifikasi lima gaya manajemen konflik: kompetisi, kolaborasi, kompromi, penghindaran, dan akomodasi .

Kolaborasi dan kompromi sering dianggap sebagai strategi yang paling efektif dalam konteks partai politik karena memungkinkan semua pihak yang terlibat mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Pembentukan struktur kepemimpinan yang inklusif dan transparan juga penting untuk mencegah terjadinya konflik dan memfasilitasi resolusi yang efektif.

2.5 Studi Empiris tentang Konflik Internal Partai di Indonesia

Beberapa penelitian empiris tentang konflik internal partai politik di Indonesia memberikan wawasan penting mengenai dinamika dan dampaknya. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Syarif Hidayat dan Siti Zuhro menunjukkan bahwa konflik internal sering kali disebabkan oleh dualisme kepemimpinan dan perbedaan visi antara elit partai . Penelitian ini juga menyoroti pentingnya mediasi eksternal dan peran komisi pemilihan umum dalam menyelesaikan konflik internal partai.

Penelitian lain oleh Fachry Ali dan Bahtiar Effendy menyoroti bahwa reformasi internal dan pembaruan struktur organisasi adalah kunci untuk mengatasi konflik internal dan memperbaiki citra serta elektabilitas partai .

BAB 3: METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis konflik internal di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan dampaknya terhadap elektabilitas partai menjelang Pemilu 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan politik yang kompleks, khususnya yang berkaitan dengan dinamika internal partai politik.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena konflik internal di PPP serta menganalisis faktor penyebab, dampak, dan strategi penanganan konflik tersebut. Desain ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam konteks, kondisi, dan dinamika yang mempengaruhi konflik internal di PPP.

3.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan, seperti:

1. Anggota dan mantan anggota PPP yang memiliki pengalaman langsung dengan konflik internal partai.
2. Pengamat politik dan akademisi yang memiliki keahlian dalam bidang partai politik dan dinamika konflik.
3. Pihak-pihak lain yang terlibat atau memiliki informasi penting terkait konflik internal PPP.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan, termasuk:

1. Artikel dan berita dari media massa yang melaporkan konflik internal PPP.
2. Laporan dan dokumen resmi dari PPP.
3. Literatur akademik yang membahas teori konflik dalam partai politik, manajemen konflik, dan studi kasus partai politik lainnya di Indonesia.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. **Wawancara Mendalam:** Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan kaya tentang pengalaman, pandangan, dan persepsi narasumber terkait konflik internal PPP. Wawancara ini dilakukan secara langsung atau melalui media komunikasi lain seperti telepon atau video call.
2. **Dokumentasi:** Pengumpulan data dari dokumen-dokumen resmi PPP, artikel media massa, dan literatur akademik yang relevan. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkaya informasi yang diperoleh dari wawancara.
3. **Observasi Partisipan:** Mengamati kegiatan, rapat, dan diskusi internal partai untuk memahami dinamika dan interaksi yang terjadi di dalam partai.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Reduksi Data:** Merangkum, memilih, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang tidak relevan atau redundan akan disingkirkan.
2. **Penyajian Data:** Menyajikan data dalam bentuk narasi, matriks, atau diagram yang memudahkan peneliti untuk melihat pola dan hubungan antar variabel.
3. **Penarikan Kesimpulan:** Menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis dan memverifikasinya dengan data lain atau melalui triangulasi dengan narasumber lain.

3.6 Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan beberapa strategi, antara lain:

1. **Triangulasi Sumber:** Menggunakan berbagai sumber data (wawancara, dokumentasi, observasi) untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi.
2. **Member Check:** Meminta umpan balik dari narasumber untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti terhadap data yang diberikan adalah akurat dan sesuai dengan maksud narasumber.
3. **Audit Trail:** Mencatat secara detail proses pengumpulan dan analisis data sehingga dapat diaudit oleh pihak lain untuk memastikan transparansi dan ketelitian penelitian.

BAB 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Faktor Penyebab Konflik Internal di PPP

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan konflik internal di Partai Persatuan Pembangunan (PPP):

1. **Kepemimpinan dan Manajemen:** Konflik sering kali muncul akibat ketidakpuasan terhadap kepemimpinan partai. Pelengseran Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum adalah contoh nyata bagaimana ketidakpuasan terhadap kepemimpinan dapat memicu konflik besar di dalam partai
2. **Dualisme Kepemimpinan:** Sejarah PPP mencatat beberapa kali terjadinya dualisme kepemimpinan, seperti yang terjadi antara Romahurmuziy dan Djan Faridz pada 2017-2018. Dualisme ini menciptakan ketidakpastian dan perselisihan di antara kader partai, yang pada gilirannya melemahkan kohesi internal .
3. **Kasus Hukum:** Isu hukum yang menjerat pemimpin partai juga menjadi sumber konflik. Kasus korupsi yang melibatkan Romahurmuziy dan Suryadharma Ali menyebabkan krisis kepercayaan di kalangan kader dan simpatisan partai, serta menambah beban konflik internal .
4. **Perbedaan Ideologi dan Visi:** Perbedaan pandangan dan visi di antara faksi-faksi dalam partai seringkali menjadi sumber ketegangan. Faksi yang memiliki kepentingan berbeda sulit untuk bersatu, sehingga memicu konflik yang berkelanjutan.

4.1.2 Dampak Konflik Internal terhadap Elektabilitas PPP

Konflik internal yang berulang kali terjadi di PPP berdampak negatif terhadap elektabilitas partai. Beberapa dampak yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. **Penurunan Kepercayaan Publik:** Konflik dan skandal yang melibatkan pemimpin partai menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap PPP. Hal ini tercermin dari berbagai survei yang menunjukkan penurunan elektabilitas partai dari pemilu ke pemilu .

2. **Fragmentasi Internal:** Konflik yang tidak terselesaikan menyebabkan fragmentasi di dalam partai, mengurangi efektivitas kerja tim, dan melemahkan struktur organisasi. Akibatnya, upaya untuk meningkatkan elektabilitas partai menjadi kurang optimal.
3. **Pengaruh Negatif pada Koalisi:** Konflik internal juga mempengaruhi hubungan PPP dengan partai-partai lain dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Ketidakstabilan internal PPP membuat koalisi ini kurang solid dan berpotensi mengurangi daya tariknya di mata pemilih .

4.1.3 Strategi Penanganan Konflik Internal

Beberapa strategi yang diusulkan untuk mengatasi konflik internal di PPP meliputi:

1. **Reformasi Kepemimpinan:** Memilih pemimpin yang memiliki integritas dan kemampuan manajerial yang baik untuk mengelola partai dan menyelesaikan konflik secara efektif. Proses pemilihan yang transparan dan demokratis sangat penting untuk mencapai tujuan ini.
2. **Mediasi dan Negosiasi:** Menggunakan mediator eksternal yang independen untuk membantu menyelesaikan konflik di antara faksi-faksi dalam partai. Mediasi yang efektif dapat mengurangi ketegangan dan menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak.
3. **Penguatan Struktur Organisasi:** Meningkatkan kohesi internal dengan membentuk struktur organisasi yang lebih inklusif dan transparan. Partai harus memastikan bahwa semua kader merasa dihargai dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
4. **Pendidikan dan Pelatihan:** Memberikan pendidikan politik dan pelatihan manajemen konflik kepada kader partai untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola perbedaan dan bekerja sama untuk kepentingan bersama.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Faktor Penyebab Konflik

Analisis faktor penyebab konflik menunjukkan bahwa masalah kepemimpinan dan manajemen merupakan akar utama dari banyak konflik di PPP. Ketidakmampuan pemimpin partai untuk mengelola perbedaan dan mengatasi krisis secara efektif memperburuk situasi. Sejarah dualisme kepemimpinan menunjukkan bahwa konflik sering kali diperparah oleh persaingan

kekuasaan di antara elit partai, yang berakibat pada fragmentasi dan melemahnya struktur organisasi.

Isu hukum yang melibatkan pemimpin partai juga memperburuk krisis kepercayaan di kalangan kader dan simpatisan. Kasus korupsi yang menjerat Romahurmuziy dan Suryadharma Ali, misalnya, menciptakan stigma negatif terhadap partai dan mengurangi daya tariknya di mata pemilih .

4.2.2 Dampak Konflik terhadap Elektabilitas

Dampak konflik internal terhadap elektabilitas PPP sangat signifikan. Penurunan kepercayaan publik akibat skandal dan perselisihan internal menyebabkan berkurangnya dukungan pemilih. Fragmentasi internal membuat partai kurang efektif dalam menjalankan kampanye dan strategi politik, sehingga sulit untuk meningkatkan elektabilitas.

Pengaruh negatif pada koalisi juga menjadi perhatian utama. Konflik internal PPP membuat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) kurang solid, mengurangi efektivitas kerjasama antar partai, dan berpotensi melemahkan daya tarik koalisi di mata pemilih .

4.2.3 Strategi Penanganan Konflik

Strategi penanganan konflik yang diusulkan meliputi reformasi kepemimpinan, mediasi, penguatan struktur organisasi, dan pendidikan politik. Reformasi kepemimpinan dengan memilih pemimpin yang kompeten dan berintegritas merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah manajerial yang menjadi akar konflik. Mediasi oleh pihak eksternal yang independen dapat membantu menyelesaikan perselisihan dengan lebih objektif (Kompas Nasional) (Kompas Nasional).

Penguatan struktur organisasi yang lebih inklusif dan transparan dapat meningkatkan kohesi internal dan mengurangi ketegangan antar faksi. Pendidikan politik dan pelatihan manajemen konflik akan membekali kader partai dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola perbedaan dan bekerja sama secara efektif.

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik internal di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menganalisis dampaknya terhadap elektabilitas partai menjelang Pemilu 2024, dan merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi konflik internal dan meningkatkan elektabilitas. Berdasarkan analisis dari BAB 1 hingga BAB 4, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Konflik Internal:

- Konflik internal di PPP dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan terhadap kepemimpinan, dualisme kepemimpinan, kasus hukum yang menjerat pemimpin partai, dan perbedaan ideologi serta visi di antara faksi-faksi dalam partai .
- Masalah kepemimpinan dan manajemen merupakan akar utama dari banyak konflik yang terjadi di PPP. Dualisme kepemimpinan dan isu hukum semakin memperparah krisis kepercayaan dan menyebabkan ketidakstabilan internal partai .

2. Dampak Konflik Internal terhadap Elektabilitas:

- Konflik internal yang berkepanjangan berdampak negatif terhadap elektabilitas PPP. Penurunan kepercayaan publik dan fragmentasi internal mengurangi efektivitas partai dalam menjalankan kampanye dan strategi politik .
- Konflik internal juga mempengaruhi hubungan PPP dengan partai-partai lain dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang mengurangi soliditas dan daya tarik koalisi di mata pemilih .

3. Strategi Penanganan Konflik Internal:

- Reformasi kepemimpinan dengan memilih pemimpin yang kompeten dan berintegritas sangat penting untuk mengatasi masalah manajerial yang menjadi akar konflik .
- Mediasi oleh pihak eksternal yang independen dapat membantu menyelesaikan perselisihan dengan lebih objektif. Penguatan struktur organisasi yang lebih

inklusif dan transparan dapat meningkatkan kohesi internal dan mengurangi ketegangan antar faksi.

- Pendidikan politik dan pelatihan manajemen konflik akan membekali kader partai dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola perbedaan dan bekerja sama secara efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan untuk PPP dalam menghadapi konflik internal dan meningkatkan elektabilitas menjelang Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

1. Reformasi Kepemimpinan:

- PPP perlu melakukan reformasi kepemimpinan dengan memilih pemimpin yang memiliki integritas tinggi, keterampilan manajerial yang baik, dan kemampuan untuk menyatukan berbagai faksi dalam partai. Proses pemilihan yang transparan dan demokratis sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

2. Mediasi dan Negosiasi:

- PPP harus menggunakan mediator eksternal yang independen untuk membantu menyelesaikan konflik internal. Mediasi yang efektif dapat mengurangi ketegangan dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, negosiasi yang terbuka dan jujur antara faksi-faksi dalam partai juga perlu dilakukan secara rutin.

3. Penguatan Struktur Organisasi:

- PPP perlu memperkuat struktur organisasi dengan membentuk mekanisme pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan transparan. Partai harus memastikan bahwa semua kader merasa dihargai dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, struktur partai harus disusun sedemikian rupa sehingga mendorong kolaborasi dan mengurangi potensi konflik.

4. Pendidikan dan Pelatihan:

- PPP harus memberikan pendidikan politik dan pelatihan manajemen konflik kepada kader partai. Pelatihan ini akan membantu kader memahami dinamika konflik dan belajar cara mengelola perbedaan serta bekerja sama secara efektif. Pendidikan politik juga penting untuk membekali kader dengan pemahaman yang lebih baik tentang ideologi dan visi partai.

5. Transparansi dan Akuntabilitas:

- PPP perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek kegiatan partai. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, pelaksanaan program, dan pengambilan keputusan akan membantu meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi potensi konflik internal.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, PPP diharapkan dapat mengatasi konflik internal yang ada, memperkuat kohesi partai, dan meningkatkan elektabilitas menjelang Pemilu 2024. Upaya-upaya ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap PPP sebagai partai politik yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan demokrasi di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Jurnal:

1. Aspinall, E., & Mietzner, M. (Eds.). (2010). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.
2. King, D. Y. (2003). *Half-Hearted Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia*. Westport, CT: Praeger.
3. Tomsa, D. (2010). *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Suharto Era*. London: Routledge.
4. Ufen, A. (2008). *Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between Politik Aliran and 'Philippinisation'*. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 27(1), 6-34.
5. Ziegenhain, P. (2008). *The Indonesian Parliament and Democratization*. Singapore: ISEAS Publishing.

Artikel Berita:

1. Kompas Nasional. (2024). Konflik Lagi, PPP Bakal Tangguh atau Runtuh pada 2024. Diakses dari www.kompasnasional.com.
2. Customer.co.id. (2024). Suharso Monoarfa Dilengserkan: Konflik Internal PPP Memanas. Diakses dari www.customer.co.id.

Sumber Online:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2024). *Pernyataan Suharso Monoarfa tentang Amplop Kiai*. Diakses dari www.kpk.go.id.
2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (2024). *Sejarah dan Perkembangan PPP*. Diakses dari www.ppp.or.id.
3. Tempo.co. (2023). Konflik Internal Partai: PPP dan Dinamika Politik di Indonesia. Diakses dari www.tempo.co.

Dokumen dan Laporan:

1. Lembaga Survei Indonesia. (2024). *Laporan Survei Elektabilitas Partai Politik Menjelang Pemilu 2024*. Jakarta: LSI.
2. Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Politik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.

Website dan Portal Berita:

1. CNN Indonesia. (2024). *Analisis Politik: Masa Depan PPP di Tengah Konflik Internal*. Diakses dari www.cnnindonesia.com.
2. Detik.com. (2023). *PPP dan Koalisi Indonesia Bersatu: Tantangan Menjelang Pemilu 2024*. Diakses dari www.detik.com.